

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Made Yogi Maha Putra ¹

I Ketut Sudibia ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Disparitas antar wilayah menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan dan tingkat kesejahteraan antar daerah sehingga membuat permasalahan ini menjadi serius. Tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) menganalisis pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini (1) Tingkat Pendidikan dan penduduk yang bekerja berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) Tingkat Pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) Pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah penduduk bekerja terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan*

ABSTRACT

Disparity between regions shows that there are differences in the level of development and the level of welfare between regions, making this problem serious. The purpose this research (1) analyze direct effect education level, working population, and investment on economic growth regencies / cities in Bali; (2) analyze direct effect education level, working population, investment and economic growth on poverty levels districts / cities in Bali; (3) analyze the indirect effects of education level, working population, and investment on poverty levels through economic growth in districts / cities in Bali. Analysis used path analysis. The results of this study (1) Education level and working population have significant positive effect, investment doesn't have effect on economic growth of districts / cities in Bali; (2) Education level, working population, investment, and economic growth have a significant negative effect on the poverty level of districts / cities in Bali; (3) Economic growth partially mediates the effect of the level of education and the number of working people on the poverty level of districts / cities in Bali. However, economic growth isn't able mediate effect investment on poverty level districts / cities in Bali.

Keywords: education level, working population, investment, economic growth, poverty level

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Arsyad (1999:13), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin meningkat dan kemajuan teknologi semakin tinggi. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2011:3).

Sejak tahun 2001 dilaksanakan otonomi daerah di Indonesia disertai kebijakan otonomi daerah di bawah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kesenjangan antar wilayah di Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai karakteristik yang sama (Hill, 1998). Meskipun menurut penelitian tersebut kesenjangan wilayah di Indonesia bukan merupakan masalah yang besar, namun pada kenyataannya kesenjangan atau ketimpangan di Indonesia telah menjadi masalah yang besar dan belum

terselesaikan hingga saat ini. Ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi antar provinsi namun juga daerah-daerah di dalam suatu provinsi.

Proses pembangunan daerah di Indonesia diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal sebagai solusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat utama dalam menekan angka kemiskinan. Menurut Kacem (2012) untuk mengurangi kemiskinan diperlukan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkurangnya ketimpangan. Menurut Adams (2004) pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan butuh waktu beberapa tahun untuk menjadi berkurang di negara-negara berkembang. Salah satu upaya untuk dapat menekan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya belum tentu dapat mengurangi kemiskinan secara efektif, hal ini dikarenakan jika peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pengurangan ketimpangan dan peningkatan faktor lainnya yang mendukung pengurangan kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh apapun terhadap pengurangan kemiskinan.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan di dalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan kemiskinan (Fosu, 2010). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu

dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 5,17 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,88 persen, kemudian tahun 2016 sebesar 5,03 persen dan tahun 2017 sebesar 5,07 persen. *World Bank* pada tahun 2018 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,2 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 5,3 persen (Bappenas, 2019). Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menjadi salah satu tolak ukur yang penting dan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (Bank Indonesia, 2017). Dengan mengetahui produk domestik regional bruto dari suatu daerah maka hal itu mampu menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum tidak hanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosial. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan alat ukur Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional. PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar, baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang sifatnya global, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan persoalan di atas maka untuk

menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau daerah, ukuran yang lebih tepat adalah PDB atau PDRB perkapita atau pendapatan perkapita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Tabel 1), dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2018 persentase pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali rata-rata sebesar 6,270 persen, yaitu lebih besar dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014-2018. Menurut Pardede dan Zahro (2017), kurangnya akselerasi harus menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu melampaui 6,0 persen, sementara itu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rata-rata memberikan gambaran sangat baik dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian secara nasional.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014– 2018 (%)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Jembrana	6,05	6,23	5,96	5,29	5,59	5,82
2	Tabanan	6,53	6,24	6,14	5,37	5,72	5,99
3	Badung	6,98	6,27	6,81	6,09	6,75	6,57
4	Gianyar	6,79	6,34	6,31	5,48	6,01	6,18
5	Klungkung	5,98	6,10	6,28	5,32	5,50	5,84
6	Bangli	5,82	6,21	6,24	5,33	5,50	5,81
7	Karangasem	6,01	6,00	5,92	5,08	5,48	5,70
8	Buleleng	6,96	6,11	6,02	5,39	5,62	6,01
9	Denpasar	7,00	6,18	6,51	6,06	6,41	6,42
	Provinsi Bali	6,73	6,04	6,33	5,57	6,35	6,20

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019*

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali dimana dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi provinsi yang dimana Kabupaten Badung mampu mencapai 6,57 persen dan Kota Denpasar mencapai 6,42 persen sementara 7 kabupaten lainnya memiliki rata-rata angka pertumbuhan ekonomi dibawah provinsi. Dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Bali cenderung masih terdapat ketimpangan yang sangat jauh antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tabel 1. menunjukkan adanya disparitas yang cukup jauh antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dibandingkan dengan Kabupaten Karangasem yang merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan yang merupakan efek dari sistem desentralisasi inilah yang masih menjadi masalah besar yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada daerahnya sedangkan pemerintah provinsi berperan dalam mengalokasikan sumber daya dan APBD secara adil untuk setiap daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tujuan utama dari suatu pembangunan adalah untuk menekan angka kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut *World Bank* (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima, selain itu mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pendidikan, investasi dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan seperti dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah di Indonesia merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Djojohadikusumo (1994:43) pola kemiskinan ada empat yaitu *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty* dan *accidental poverty*. Kemiskinan yang pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*,

yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Tidak hanya Indonesia, Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang juga tidak bisa lepas dari permasalahan ini. Padahal Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yang apabila dilihat dari perekonomian Bali pada tahun 2018 tumbuh sebesar 6,35 persen yang artinya lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meskipun Provinsi Bali mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini bukan berarti Bali bisa lepas dari masalah kemiskinan ini.

Pada bulan September 2015 para pemimpin dunia bersama PBB telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari Agenda 2030, dimana salah satu tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini adalah menghentikan segala bentuk dari kemiskinan dimanapun. SDGs, yang juga dikenal sebagai *Global Goals*, membangun kesuksesan *Millenium Development Goals* (MDGs) dan bertujuan untuk melangkah ke arah yang lebih baik untuk mengakhiri semua bentuk kemiskinan. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang membangun pertumbuhan ekonomi dan menangani berbagai kebutuhan sosial seperti pendidikan, lapangan pekerjaan,

kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pembangunan mungkin sulit dilakukan di negara-negara miskin tanpa pendidikan kualitatif dan kuantitatif, mungkin juga sulit bagi negara untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui pendidikan jika persentase penduduk tinggi berada di bawah atau pada tingkat kemiskinan (Oghuvbu,2007). Pembangunan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai strategi pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun dalam realitasnya masih terdapat diskrepansi antara harapan dan kenyataan di lapangan berupa kemiskinan (Soejoto dan Karisma, 2011).

Provinsi Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat, namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, ini membuktikan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas manusia (*human capital development*) sangat diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan kronis, salah satunya adalah melalui pendidikan, dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang mereka agar dapat secara permanen keluar dari kemiskinan (Inna, 2014). Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya dipandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tetapi sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2014-2018 cenderung menurun meskipun masih terjadi disparitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masih menjadi daerah dengan rata-rata penduduk miskin terendah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dimana angka kemiskinan kedua kabupaten/kota tersebut berada dibawah angka kemiskinan provinsi, sementara 7 kabupaten lainnya berada diatas angka kemiskinan provinsi. Masalah

ketimpangan ini perlu diberikan perhatian lebih terutama kepada Kabupaten Karangasem yang selalu menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Bali yang dimana masalah ini harus segera diselesaikan agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 (%)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jembrana	5,83	5,84	5,33	5,38	5,20
2	Tabanan	5,61	5,52	5	4,92	4,46
3	Badung	2,54	2,33	2,06	2,06	1,98
4	Gianyar	4,57	4,61	4,44	4,46	4,19
5	Klungkung	7,01	6,91	6,35	6,29	5,86
6	Bangli	5,86	5,73	5,22	5,23	4,89
7	Karangasem	7,30	7,44	6,61	6,55	6,28
8	Buleleng	6,79	6,74	5,79	5,74	5,36
9	Denpasar	2,21	2,39	2,15	2,27	2,24
	Provinsi Bali	4,76	4,74	4,25	4,25	4,01

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019*

Bali merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan bisnis pariwisatanya yang telah mendunia, hal tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, Pemerintah Provinsi Bali tentu harus berusaha melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu memaksimalkan peran dari masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Infrastruktur, investasi dan pendidikan berkualitas tinggi adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila hal ini diperhatikan oleh pemerintah maka akan mempersempit kesenjangan antar daerah dan sektor ekonomi wilayah dan pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan produktivitas, yang akan mendorong pertumbuhan (Boediono 2017). Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang

dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan mengenai investasi sumber daya manusia di dunia pendidikan dan kemiskinan hampir serupa. Umumnya menghadapi dilema apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih didahulukan ataukah investasi pendidikan yang lebih baik. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan cukup penting karena pendidikan memiliki peranan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Haughton, 2012).

Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia. Variabel pendidikan itu sendiri berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sudiharta dan Sutrisna, 2014). Menurut Setyopurwanto (2013) pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan dalam bekerja, dengan demikian maka dapat meningkatkan produktivitas kerja. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa dengan peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu upaya ampuh untuk meningkatkan pendapatan seseorang yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk dapat keluar dari status miskin di masa depan (Anderson, 2012). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mankiw dan Weil (1992) yaitu apabila investasi pendidikan dilakukan secara merata, termasuk pada masyarakat yang berpenghasilan rendah

maka kemiskinan akan berkurang. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Ilmu dan teknologi yang diberikan di lembaga pendidikan apabila dikuasai oleh lulusannya akan menjadi modal sebagai tenaga kerja produktif dan akhirnya akan meningkatkan ekonomi (Sefa *et al.*, 2015).

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Todaro (2003:413) membuktikan bahwa pendidikan memang memiliki pengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan “modal manusia” di masa yang akan datang. Constantinos (2009) menyatakan peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut Chon (1997), individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya, serta masyarakat memperoleh manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang semakin tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan. Sasih dan Saskara (2016) dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya.

Selain pendidikan, penduduk yang bekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Umumnya seseorang yang berada pada usia produktif akan mampu memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (Rahayu, 2014), oleh karena itu penduduk yang bekerja pada umumnya

akan mampu mendapatkan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Secara ekonomis penduduk yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, penduduk yang bekerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan fenomena yang masih perlu diperhatikan di Indonesia khususnya di Bali, apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Saat ini, banyak penduduk yang melakukan migrasi dan urbanisasi melihat peluang kerja di Provinsi Bali semakin besar. Dengan situasi seperti ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur penduduk, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk yang bekerja.

Menurut Danawati dkk (2016), keberhasilan pembangunan di suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya jumlah pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah investasi yang terjadi di suatu daerah. Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (*self reliant development*) dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerah-daerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal. Masalah kekurangan modal merupakan salah satu faktor yang paling sering mendapat perhatian lebih (Hendra, 1991). Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu daerah maupun negara karena berperan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012;29; Sarungu, 2013;112). Modal dapat berasal dari investasi baik dari dalam negeri maupun modal dari luar negeri (Fazaalloh, 2019). Penanaman Modal Asing (PMA) masih

diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Sukirno, 2006). Pemerintah memandang perlunya menempuh kebijakan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bentuk partisipasi dalam upaya menanggulangi masalah tersebut adalah dengan penanaman modal atau investasi. Investasi ialah pembelian barang-barang yang digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Kuantitas tenaga kerja dalam kegiatan produksi dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat adanya permintaan (Taufik dkk, 2014).

Ketepatan pemerintah dalam menentukan kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah, dan arah investasi ke daerah-daerah dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah. Terserapnya tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, namun seandainya distribusi pengeluaran belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan di kabupaten/kota akan tetap terjadi sehingga masyarakat dengan penghasilan yang rendah tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk ikut berperan dalam proses pembangunan.

Menurut Thomas (2015) investasi sangat penting karena dapat memulihkan hubungan Indonesia dengan perekonomian dunia. Selain itu, investasi juga meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input, oleh karena adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas (Irma *et al.*, 2015). Melalui investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah yaitu, potensi sumber daya alam yang

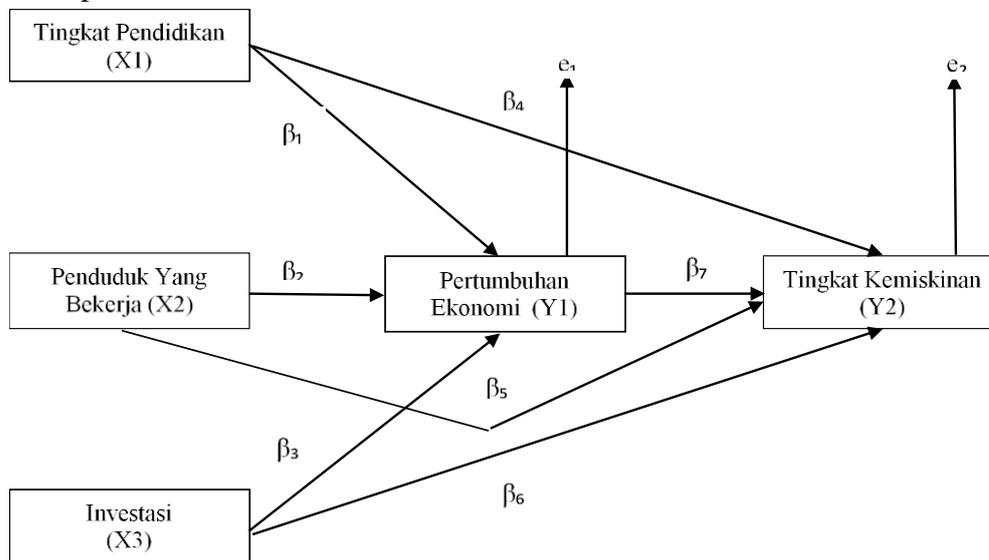
menarik, kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan serta angka korupsi di suatu daerah (Lindblad, 2015). Investasi mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kesempatan kerja (Jordi *et al.*, 2003). Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh Keynes dalam Jhingan (2003,133-134) dan Mankiw (2006:93), Harrod Domar dalam Arsyad (2010:82-86), Solow-Swan dalam Arsyad (2010:88-89), Kuznet dalam Arsyad (2010:277), Todaro (2000:136), dan Schumpeter dalam Sukirno (2008:122). Investasi dapat berupa penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan yang masih menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi menjadi faktor-faktor yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu antara satu faktor dan faktor yang lainnya saling tidak terlepas satu sama lain. Berdasarkan latar belakang di atas maka mendesak dilakukan sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme. Obyek dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti variabel tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi. Titik pengamatan pada penelitian ini adalah sebanyak 45 titik, yaitu terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2013-2017. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan alasan bahwa di Bali masih terdapat ketimpangan yang sangat lebar antar kabupaten/kota seperti yang dialami Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli sangat berbeda dengan kondisi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan kondisi tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Masih tingginya ketimpangan dan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali menjadi alasan untuk pemilihan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian ini.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Model analisis jalur pada Gambar 1 dapat diuraikan ke dalam dua sub struktur (persamaan) yaitu:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Penduduk yang bekerja

X_3 = Investasi

Y_1 = Pertumbuhan ekonomi

Y_2 = Tingkat Kemiskinan

e_1, e_2 = variabel pengganggu

Anak panah e_1 menunjukkan jumlah variansi variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), dan investasi (X_3). Anak panah e_2 menunjukkan jumlah variansi variabel tingkat kemiskinan (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), investasi (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - r_1^2} \dots \dots \dots (3)$$

$$Pe_2 = \sqrt{1 - r_2^2} \dots \dots \dots (4)$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

Hasil koefisien determinasi total

$$R^2_m = 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

R^2_m : Koefisien determinasi total

e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*), dimana analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan kausalitas antara 2 variabel atau lebih. Tahap-tahap dalam melakukan teknik analisis jalur adalah sebagai berikut:

Perhitungan koefisien *path* dan menentukan persamaan model struktural

Perhitungan koefisien *path* dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18.0 for Windows*, dan diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji *Path analysis* (Struktur 1)

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t hitung	Sig. uji t
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
(<i>Constant</i>)	0,039	0,092		0,425	0,673
Tingkat pendidikan	0,378	0,079	0,441	4,809	0,000
Penduduk yang bekerja	0,229	0,082	0,253	2,783	0,008
Investasi	0,612	0,085	0,636	7,218	0,000

Sumber: *Data sekunder diolah, 2020* (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 1 seperti yang disajikan pada Tabel 3, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,378 X_1 + 0,229 X_2 + 0,612 X_3$$

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja dan investasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), dan investasi (X_3), memiliki pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Tabel 4 Hasil Uji Path analysis (Struktur 2)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	Sig. uji t
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,053	0,089		-0,592	0,557
Tingkat pendidikan	-0,220	0,095	-0,243	-2,323	0,025
Penduduk yang bekerja	-0,636	0,086	-0,667	-7,366	0,000
Investasi	-0,328	0,123	-0,323	-2,669	0,011
Pertumbuhan ekonomi	-0,561	0,150	-0,530	-3,727	0,001

Sumber: *Data sekunder diolah, 2020 (Lampiran 3)*

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 2 seperti yang disajikan pada Tabel 4, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_2 = -0,220X_1 - 0,636 X_2 - 0,328 X_3 -0,561 Y_1$$

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai negatif dengan nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), investasi (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y_2).

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam perhitungan statistik ini, nilai R^2 yang digunakan adalah *adjusted R²* karena ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan satu variabel independen kedalam satu persamaan regresi. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi

Struktur	Persamaan	R Square	Adjusted R Square
1	$Y_1 = 0,378 X_1 + 0,229 X_2 + 0,612 X_3$	0,689	0,666
2	$Y_2 = -0,220X_1 - 0,636 X_2 - 0,328 X_3 -0,561 Y_1$	0,748	0,723

Sumber: *Data sekunder diolah, 2020 (Lampiran 3)*

Tabel 5 menunjukkan pada persamaan struktur 1 (analisis jalur 1) besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,666 mempunyai arti bahwa sebesar 66,6 persen variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dipengaruhi oleh variasi tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), dan investasi (X_3), sementara itu sisanya sebesar 33,4 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya pada persamaan struktur 2 (analisis jalur 2) besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,723 mempunyai arti bahwa sebesar 72,3 persen variasi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali dipengaruhi oleh variasi tingkat pendidikan (X_1), penduduk yang bekerja (X_2), investasi (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y). Sisanya sebesar 27,7 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan model substruktur 1 dan substruktur 2, maka dapat disusun model diagram jalur akhir. Sebelum menyusun model diagram jalur akhir, terlebih dahulu dihitung nilai *standard error* sebagai berikut :

$$Pe_1 = \sqrt{1 - R_1^2} = \sqrt{1 - 0,666} = 0,578$$

$$Pe_2 = \sqrt{1 - R_2^2} = \sqrt{1 - 0,723} = 0,526$$

Berdasarkan perhitungan pengaruh *error* (Pe_i), didapatkan hasil pengaruh *error* (Pe_1) sebesar 0,578 dan pengaruh *error* (Pe_2) sebesar 0,526. Hasil koefisien determinasi total adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,578)^2 (0,526)^2 \\ &= 1 - (0,334) (0,276) \\ &= 1 - 0,092 = 0,908 \end{aligned}$$

Nilai determinasi total sebesar 0,908 mempunyai arti bahwa sebesar 90,8 persen variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variasi tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sisanya sebesar 9,2 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Lngung Variabel

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi 0,378. Nilai signifikansi $0,000 < 0,050$ mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis pertama menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi dimana jika tingkat pendidikan meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Seran (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Penduduk yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh penduduk yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan nilai koefisien regresi 1,092. Nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin banyak

jumlah penduduk yang bekerja akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Sudibia (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sandhika dan Hendarto (2012) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008 dengan nilai koefisien regresi 0,229. Nilai signifikansi $0,008 > 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis ketiga menunjukkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti semakin banyak jumlah investasi yang diterima suatu wilayah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh teori dari Pangestu (1996), dimana dikatakan bahwa antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Jika investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkat (Sarah, 2017).

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025 dengan nilai koefisien regresi -0,220. Nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis keempat menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap pengurangan kemiskinan, dimana jika tingkat pendidikan naik maka kemiskinan akan menurun. Hasil serupa diperoleh dalam penelitian Seran (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yakni melalui pendidikan akan membuka peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi saat ini ataupun di masa mendatang.

Pengaruh Penduduk yang Bekerja Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh penduduk yang bekerja terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi -0,636. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis kelima menyatakan bahwa penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah penduduk bekerja di suatu wilayah, maka akan mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahayu (2014) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah penduduk bekerja akan mengurangi jumlah kemiskinan, sebab penduduk yang bekerja biasanya akan mampu mendapatkan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Secara ekonomis penduduk yang bekerja akan memperoleh penghasilan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, penduduk yang bekerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aristina dkk. (2017) dan Seran (2017) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja, maka

menunjukkan jumlah pengangguran yang semakin sedikit, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,328. Nilai signifikansi $0,011 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_6 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis keenam menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah investasi yang diperoleh Provinsi Bali, maka akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, Hasil penelitian ini mendukung temuan Jana dan Yasa (2019) yang memperoleh hasil bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi yang masuk ke suatu daerah secara langsung akan menambah kapital di daerah serta meningkatkan kegiatan ekonomi. Jika arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang menambah aktivitas perekonomian daerah tersebut (Rizal dalam Dewi, 2015). Artinya semakin tinggi akumulasi kapital maka akan merangsang semakin meningkatnya kesempatan kerja maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada menurunnya jumlah kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai koefisien

regresi -0,561. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_7 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis ketujuh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hermanto dan Dwi (2006) mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dalam menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkat, namun juga disertai dengan meratanya hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut ke seluruh lapisan masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan adanya ketimpangan, maka pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya hanya akan berujung pada kemiskinan di beberapa daerah. Hal tersebut akan menjadi suatu kegaaglan bagi pemerintah daerah tersebut karena mengurangi masyarakat miskin adalah salah satu syarat keberhasilan pembangunan daerah.

Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memediasi pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah penduduk bekerja terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan dan jumlah penduduk bekerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan

dengan syarat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menyebabkan terjadinya ketimpangan antar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sebagian orang atau golongan tertentu saja tidak akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan menambah tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin tidak dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

SIMPULAN

- 1) Tingkat pendidikan dan penduduk yang bekerja berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Tingkat Pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Saran bagi pemerintah untuk senantiasa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sehingga terjamin pemerataan pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta tetap berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Disarankan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk lebih menggali potensi daerahnya sehingga nantinya ekonomi daerah bisa semakin bertumbuh, lapangan pekerjaan semakin banyak sehingga banyak tenaga kerja yang mampu diserap dan diberdayakan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan

yang ada.

- 3) Disarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan investasi dengan menyesuaikan potensi daerah masing-masing, sehingga nantinya potensi daerah tersebut dapat dikembangkan untuk menarik investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sehingga akan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Adams, R. H. (2004). "Economic growth, inequality and poverty: estimating the growth elasticity of poverty". *World Development*, Vol.32 No.12 Hal.1989-2014
- Alghofari, Farid. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ.Diponegoro Semarang*.
- Anderson, Courtney Lauren. (2012). *Opening Doors: Preventing Youth Homelessness Through Housing and Education Collaboration*. Seattle *Journal for Social Justice*. Vol.11 No.2 Hal.457-522
- Anom Iswara, I Made Dan I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, Vol.3 No.11 Hal.492-501.
- Ayu Purnama Margareni, Ni Putu, I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.12 No.1 Hal.101-110.
- Barber, C. (2008). 'Notes on poverty and inequality'. Background Paper. Oxford: Oxfam International.
- Chon, Elchanan, (1997). *The Economics of Education: An Introduction*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Constantinos, Alexiou, (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*. Vol.11 No.1 Hal.1-16
- Danawati, Sri, I Koamng Gde Bendesa, Made Suyana Utama. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.5 No.7 Hal.2337-3067
- Dewi. (2015). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4 No.6 Hal.621-636.

- Fazaalloh, Al Muizzudin. (2019). Penanaman Modal asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.12 No.1
- Fosu, Augustin Kwasi. (2010). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. CSAE Working Paper WPS, 07. Hal.306-336
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. (2012). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality). Jakarta: Salemba Empat.
- Hill, Hal. (1998) The Challenge of Regional Development in Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*. Vol.52 No.1 Hal.19-34
- Inna Dariwardani, Ni Made. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008–2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.7 No.1 Februari 2014 Hal.7-15.
- Jana Loka Adi Parwa, I Gusti Ngurah, I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol.8 No.5 Hal.945-973
- Kacem, Rami Ben Haj. (2012). Monetary versus Non-Monetary Pro-Poor Growth : Evidence from Rural Ethiopia between 2004 and 2009. *Economics Discussion Papers*. Hal. 20-62
- Klein and Dompe. 2007. Reasons for Supporting the Minimum Wage: Asking Signatories of the “Raise the Minimum Wage” Statement. *Economic in Practice*. Department of Economics, George Mason University. Vol.04 No.01 Hal.125-167
- Lindblad, J. Thomas. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.51 No.2 Hal.217-273.
- Mankiw, D.Romer, D. Weil. 1992. A Contribution to The Empirics of the Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*. Vol.127 No.2 Hal.407- 437.
- Myanti Astrini, A. Ni Made dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Udayana. Vol.2 No.8 Hal.384-392
- Oghuvbu. Enamiroro Patrick. (2007). Education, Poverty and Development in Nigeria : The Way Forward in the 21th Century. *Abraka Nigeria*, Delta State University. *J. Soc.Sci.*, Vol.14 No.1 Hal.19-24.
- Pardede, Raden and Shirin Zahro (2017) Saving not Spending: Indonesia’s Domestic Demand Problem, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.53 No.3 Hal.233-259
- Rahayu, Shabrina Umi dan Ni Made Tisnawati. (2014). Analisis Pendapatan Keluarga Wanita Single Parents (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. Vol.7 No.2 Hal.83-89

- Rodriguez-Pose, A. and D. Hardy. (2015). Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global. *Applied Geography*.
- Sabia, Joseph. (2008). The Effects of Minimum Wage Increases in New York State: Evidence From a Natural Experiment. Department of Public Administration and Policy American University.
- Sarah, Dong Xue; Manning, Chris. (2017). Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol.53 No.1 Hal.10.
- Sarungu, J.J, Maharsi, Endah K. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.6 No.2 Hal.112.
- Sasih Purnami, Ni Made dan Ida Ayu Nyoman Saskara. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.5 No.11 Hal.1188-1218
- Sefa, Awaworyi Churchill, Siew Ling Yew and Mehmet Ugur, (2015). Effects of Government Education and Health Expenditures on Economic Growth: A Meta-analysis. *International Journal of monash.edu/ business-economics*. Vol.40 No.15 Hal.1-26
- Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.10 No.2 Hal.59-71
- Vincent, Brian. (2009). The Concept 'Poverty' towards Understanding in the Context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty'. *Journal of Sustainable Development*, Vol.2 No.2 Hal.3-13
- Williamson, Deanna L. (2001). The Role of The Health Sector in Addressing Poverty. *Canadian Journal of Public Health* , Vol.92 No.3 Hal.178-183
- Yasa, Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.8 No.1 Hal.63-71
- Yogi Swara, Wayan dan I Made Jember. (2011). Kemiskinan di Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.7 No.2 Desember 2011
- Yuni Adipuryanti, Ni Luh Putu dan I Ketut Sudibia. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.11 No.1 Hal.20-28